



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan strategis terkait inovasi dan pelayanan publik yang meliputi: (1) Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (2) Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (3) Penyusunan dan sosialisasi Instruksi Presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (4) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (5) Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah, perlu dilakukan koordinasi dan membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.**

PERTAMA: ...

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. merumuskan konsep Sekretariat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis SPM kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN: ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2018
TANGGAL 14 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Ir. Diah Indrajati, M.Sc, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Drs. Bob Ronald Fretsy Sagala, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Iwan Kurniawan, ST, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Daryll Ichwan Akmal SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Taufik ...

10. Taufik Udayat Putra, ST, M.Eng, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rizki Yuwanita Habibah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Diantha Arafia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Moris Nuaimi, SE, M.T, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati